

SISTEM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Sahrodin

(Dosen IAI An-Nur Lampung)

Abstract

Islamic Education as a sub-system in National Education, it has strategic role to get the goal of National Education. In three decade, Islamic Education has good contribution in Education in Indonesia. The consequence from opened attitude in management, so to decide the agreement in discussion, every people will responsible and have commite in do the agreement. The effort to implementation the Islamic Education that consistent with our vision that need some tactics ways. Islamic Education Board like Madrasahin the first it must change in system of management. in this case the leader of Madrasah must have vision, responsible, knowledge, and the good managerial skill.

Key Words: Islamic Education System, Educational Institutions

A. PENDAHULUAN

Sistem adalah sejumlah elemen (objek, orang, aktivitas, rekaman, informasi dan lain-lain) yang saling berkaitan dengan proses dan struktur secara teratur, dan merupakan kesatuan organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan hasil yang dapat diamati (dapat dikenal wujudnya) sehingga tujuan tercapai.

Sistem adalah suatu kesatuan dari komponen-komponen yang masing-masing berdiri sendiri tetapi saling terkait satu dengan yang lain, sehingga terbentuk suatu kebulatan yang utuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen-komponen yang berada di dalam sistem pendidikan sangat beragam. Noeng Muhadjir mensistematisasi komponen tersebut dalam tiga kategori, yaitu : Bertolak dari lima unsur dasar pendidikan, meliputi yang memberi, yang menerima, tujuan, cara/jalan, dan konteks positif, bertolak dari empat komponen pokok pendidikan, meliputi kurikulum, subjek didik, personifikasi, dan konteks belajar mengajar, bertolak dari tiga fungsi pendidikan, meliputi pendidikan kreativitas, pendidikan moralitas dan pendidikan produktivitas.

Pendidikan adalah transformasi ilmu pengetahuan, budaya, sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada suatu generasi agar dapat ditransformasi kepada generasi berikutnya. Dalam pengertian ini, pendidikan tidak hanya merupakan transformasi ilmu, melainkan ia sudah berada dalam wilayah transformasi budaya dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan dalam makna yang demikian, jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pengertian yang hanya merupakan transformasi ilmu. Dalam pengertian yang terakhir ini, para ahli hanya menempatkannya sebagai proses belajar.

Para ahli pendidikan memang membedakan pengertian belajar dengan proses pendidikan. Bahwa belajar merupakan salah satu inti dari kegiatan proses pendidikan, menurut Moh. Uzer Usman itu tidak dapat dinafikan.¹ Tetapi

¹Moh. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional* (Bandung : Rosdakarya, 1992), h. 1.

makna yang terkandung dalam dua istilah ini, menurutnya sangat berbeda. Kegiatan belajar terbatas hanya pada bagaimana guru (orang dewasa) mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada mereka yang dianggap belum memiliki ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses yang menyangkut : (1) Proses transformasi informasi (berarti proses pembelajaran), (2) Perkembangan pribadi, (3) Interaksi sosial, dan (4) Modifikasi tingkah laku. Dari pengertian ini, makna pendidikan jauh lebih luas dibandingkan dengan makna pembelajaran meskipun dalam proses pendidikan, proses pembelajaran tetap dilangsungkan. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengan-dung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

B. PEMBAHASAN

1. Komponen Sistem Pendidikan Islam

Dalam praktiknya, sebagai suatu sistem, pendidikan Islam terdiri dari beberapa komponen. Zahara Idris dan Lina Jamal menjelaskan bahwa beberapa komponen dalam pendidikan adalah tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, alat dan lingkungan.²

Sehingga, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan ialah kesatuan komponen-komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua unsur itu saling terkait dan bersatu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara teori, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan.

Adapun komponen atau faktor pendidikan tersebut terdiri dari : (1) tujuan, (2) peserta didik, (3) pendidik, (4) alat pendidikan, dan (5) lingkungan.³

²Zahara Idris dan Lina Jamal. *Dasar Pendidikan*, Jakarta : Gramedia, 1992, h. 28.

³Ahmad D Marimba. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986, h. 19.

Sementara menurut Nur Uhbiyati, segi-segi atau pihak-pihak (komponen) yang terlibat dalam pendidikan, sedikitnya ada sembilan komponen, yaitu : (1) perbuatan mendidik itu sendiri, (2) anak didik, (3) dasar dan tujuan pendidikan, (4) pendidik, (5) materi, (6) metode, (7) evaluasi, (8) alat pendidikan, dan (9) lingkungan pendidikan.⁴

Senada dengan uraian tersebut Abudinnata menjelaskan bahwa komponen yang dimaksud adalah tujuan, kurikulum, guru, metode, pola hubungan guru murid, evaluasi, sarana dan prasarana, lingkungan dan evaluasi pendidikan.⁵

Dari pendapat itu, komponen sistem pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat pembelajaran ada enam komponen, yakni : (1) dasar dan tujuan, (2) pendidik, (3) peserta didik, (4) kurikulum (tujuan, materi, metode, dan evaluasi), (5) sarana dan prasarana (fasilitas), dan (6) lingkungan. Sementara unsur yang sederhana dari sistem pembelajaran setidaknya terdiri dari empat unsur, yakni: (1) tujuan pembelajaran, (2) materi pembelajaran, (3) metode pembelajaran, dan (4) evaluasi pembelajaran. Dan Biasanya unsur yang seperti ini dipahami sebagai unsur kurikulum.

2. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam sebagai salah satu subsistem dalam sistem pendidikan nasional, memiliki peran yang strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Maksum mencatat bahwa dalam perkembangan tiga dekade terakhir, pendidikan Islam tampak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pendidikan di Indonesia.⁶

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus aset bagi pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, ia merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat

⁴Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1998, h.14-15.

⁵Abudinnata. *Manajemen Pendidikan*, h.161.

⁶Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Logos, 1999, h. 1.

Islam dari masa ke masa. Sedangkan sebagai aset, pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Dalam kedua perspektif di atas, pendidikan Islam di Indonesia selalu menjadi lahan pengabdian kaum muslimin dan sekaligus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Husni Rahim menjelaskan bahwa mendiskusikan masalah pendidikan Islam di Indonesia secara garis besar terbagi ke dalam dua tingkatan, yaitu makro dan mikro. Pada level yang *pertama*, pendidikan Islam bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional dan faktor-faktor eksternal lain. Sedangkan pada level yang *kedua*, pendidikan Islam dihadapkan pada tuntutan akan proses pendidikan yang efektif sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.⁷

Berbagai persoalan dari kedua level di atas pada prinsipnya mendorong adanya perubahan arah pendidikan Islam mengingat tantangan kontemporer dan tantangan masa depan yang berbeda dengan tantangan masa lalu. Dalam uraian berikut akan dikemukakan secara sekilas latar belakang dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebagai wawasan untuk melakukan perubahan. Kemudian, pembahasan berkembang ke arah penegasan visi dan strategi pembinaan lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, di Indonesia.

3. Kedudukan dan Fungsi Madrasah Aliyah

Madrasah Aliyah adalah salah satu bentuk jenjang pendidikan formal pada pendidikan menengah.⁸ Madrasah Aliyah merupakan Sekolah Menengah Umum yang berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.⁹ Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam walaupun mempunyai tujuan khusus akan tetapi pendidikan

⁷Husni Rahim. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001, h.4.

⁸UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Bab VI pasal 18 ayat 3.

⁹KMA Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Bab I Pasal 1, h. 279.

yang dilaksanakannya harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam arti bahwa pendidikan pada madrasah harus dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia khususnya dari awal sampai proses menamatkan anak didik telah diatur oleh pusat sebagai pemegang kebijakan, maka perlu adanya upaya restrukturisasi ataupun reformasi dalam dunia pendidikan. Mungkin adanya kurikulum berbasis sekolah adalah merupakan langkah awal dalam menata ulang sistem pendidikan yang sudah berlaku untuk kemajuan suatu lembaga pendidikan yang akan datang.

Madrasah Aliyah berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan, yaitu : (1) meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, (2) meningkatkan kemampuan siswa untuk mengembaangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam, dan (3) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya dijiwai ajaran agama Islam.¹⁰ Ada beberapa hal yang perlu diketengahkan dalam perbincangan tentang status, kedudukan dan fungsi madrasah, khususnya madrasah aliyah ke depan, yaitu :

Pertama, perlu melihat *setting* sejarah kehadiran madrasah di masyarakat. Hal ini penting agar peran serta masyarakat atau keswadayaan yang merupakan basis pendukung kelangsungan hidup sejarah madrasah ini tidak terabaikan, bahkan akan terus dijadikan modal dasar untuk melakukan peningkatan kualitas madrasah.

Madrasah sebagaimana diketahui telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Kehadirannya merupakan sahutan terhadap tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan yang memenuhi dua dimensi kebutuhan, yaitu penguasaan ilmu

¹⁰KMA Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah Bab I Pasal 1, h. 280.

pengetahuan dan teknologi dan pendidikan keagamaan. Keduanya jika dilihat dari setting historis tidak dapat dipenuhi oleh sekolah umum yang dipersiapkan oleh pemerintah kolonial maupun pondok pesantren yang menitikberatkan pada pengetahuan agama saja. Keseimbangan antara dua dimensi ini (penguasaan Iptek dan pendidikan keagamaan) masih relevan dengan tuntutan masyarakat sekarang dan yang akan datang, terutama jika dilihat dari kecenderungan-kecenderungan yang muncul belakangan ini. Mampukah madrasah memanfaatkan peluang yang ada dalam masyarakat ? Hal ini juga telah melahirkan tuntutan untuk melakukan upaya peningkatan dalam berbagai segi di internal madrasah.

Kedua, secara *de facto* keberadaan madrasah di tengah-tengah masyarakat telah mendapat pengakuan, maka kehadirannya tidak diragukan lagi. Hanya saja secara *de jure* madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baru tampak secara tegas setelah lahir Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Beberapa dekade yang lalu dan bahkan dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, institusi pendidikan madrasah ini terkesan dibiarkan tumbuh dengan sendirinya sebagai *indigenous institution*. Sentuhan-sentuhan pemerintah yang dapat mendorong terjadinya eskalasi peningkatan mutu dirasa masih belum seimbang dibanding dengan perlakuan yang diberikan ke sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).

Dari politik anggaran misalnya, terdapat ketimpangan dalam alokasi anggaran untuk lembaga pendidikan madrasah ini. Hal ini mempunyai hubungan dengan status dan garapan utama Kementerian Agama. Perbedaan perlakuan anggaran untuk madrasah telah terjadi dan bahkan masih dirasakan. Kementerian Agama harus mengalokasikan dana yang diterimanya (bidang agama) untuk pembinaan dan pengembangan madrasah agar lembaga ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ketimpangan yang mencolok mengakibatkan

madrasah-madrasah pada satu dimensi “tertinggal” dari sekolah-sekolah yang kini berada dalam naungan kementerian Pendidikan Nasional.

Ketiga, pandangan tentang proporsionalitas dan politik penyelenggaraan pendidikan perlu dipertimbangkan dalam melihat persoalan madrasah ke depan. Pertanyaan yang acapkali muncul dalam diskusi adalah siapa yang paling otoritatif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini akan dijumpai pandangan bahwa pendidikan semestinya berada dalam satu atap dan Kementerian Pendidikan Nasional dipandang sebagai lembaga paling otoritatif. Pandangan ini tidak serta merta dapat diterima karena alasan bahwa sebagian kaum muslim belum yakin apabila madrasah atau pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam satu atap. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah integrasi madrasah atau pendidikan keagamaan dalam satu wadah tidak akan mereduksi penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Dengan kata lain, hal itu akan mempercepat proses sekularisasi.

Sepakat dengan uraian di atas, jika melihat hakikat pendidikan madrasah yang mencoba mengintegrasikan antara agama dan ilmu pengetahuan dan kedudukannya yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, menurut Husni Rahim¹¹ maka sekurang-kurangnya madrasah, dalam hal ini madrasah, telah memainkan fungsi sebagai berikut:

a. Media Sosialisasi Nilai-nilai Ajaran Agama

Sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas keagamaan, melalui sifat dan bentuk pendidikan yang dimilikinya, madrasah mempunyai peluang lebih besar untuk berfungsi sebagai media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama kepada anak didik secara lebih efektif karena diberikan secara dini. Sifat keagamaan yang melekat pada kelebagaannya menjadikan madrasah mempunyai mandat yang kuat untuk melakukan peran tersebut. Sedangkan sebagai sistem persekolahan, madrasah dimungkinkan melakukan sosialisasi agama secara massif. Masalahnya sekarang adalah sejauhmana dapat menciptakan madrasah yang mempunyai

¹¹ Husni Rahim. *Arah Baru*, h.32-35.

pendidikan agama yang berkualitas. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang digariskan telah berupaya melakukan berbagai pembenahan kondisi pendidikan madrasah, yang bersifat fisik maupun non-fisik (kependidikan), khususnya melalui program peningkatan mutu madrasah, baik yang dibiayai dari dana rutin maupun dana bantuan luar negeri.

b. Pemelihara Tradisi Keagamaan

Sebagai institusi pendidikan yang berciri keagamaan, salah satu peran penting yang diemban oleh madrasah adalah memelihara tradisi-tradisi keagamaan. Pemeliharaan tradisi keagamaan ini dilakukan di samping secara formal melalui pengajaran ilmu-ilmu agama seperti al-Qur'an, hadits, akidah, akhlak, fiqh, bahasa Arab dan sejarah kebudayaan Islam, juga dilakukan secara informal melalui pembiasaan untuk mengerjakan dan mengamalkan syariat agama sejak dini. Misalnya, anak-anak sejak kecil dibiasakan untuk mengerjakan shalat dan puasa pada bulan Ramadhan, mengunjungi teman yang sakit atau kena musibah, mengucapkan salam bila bertemu kawan, dan sebagainya. Pemeliharaan tradisi keagamaan ini sedang mendapatkan tantangan dari perkembangan kehidupan yang semakin bersifat materialistik dan individualistik sebagai dampak dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.

c. Membentuk Akhlak dan Kepribadian

Peran kultural madrasah dan pondok pesantren telah diakui oleh banyak pihak bahkan sampai sekarang. Sistem pendidikan pondok pesantren masih dianggap satu-satunya lembaga yang dapat mencetak calon ulama (*reproduction of ulama*). Banyak ulama dan pemimpin nasional yang menjadi panutan masyarakat dan bangsa lahir dari sistem pendidikan Islam ini. Hal ini bisa terjadi karena sistem pendidikannya di samping menekankan penguasaan pengetahuan yang luas juga sangat memperhatikan pendidikan etika dan moral yang tinggi. Tujuan pendidikan madrasah atau pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan pengetahuan-pengetahuan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah

laku jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati.

d. Benteng Moralitas Bangsa

Pesatnya kemajuan pembangunan nasional selama tiga dekade ini telah membawa pengaruh positif bagi kemajuan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tingkat kesejahteraan yang bersifat materi. Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia telah meningkat pesat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada gilirannya kemajuan ini telah ikut meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sekarang ini masyarakat relatif cukup mudah untuk memperoleh pangan dan sandang. Namun, di sisi lain kemajuan ekonomi ini pada gilirannya juga telah melahirkan masalah-masalah baru, seperti kesenjangan sosial yang semakin tinggi antara yang kaya dan miskin, meningkatnya tindak kriminalitas, seperti pembunuhan dan perampokan sadis, meningkatnya jumlah kenakalan remaja, berkembangnya pergaulan bebas dan praktek prostitusi, merosotnya kepedulian sosial masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mulai melirik kembali kepada lembaga pendidikan Islam seperti madrasah atau pondok pesantren. Sepuluh tahun terakhir ini muncul kecenderungan sebagian keluarga kelas menengah di Indonesia untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren. Kecenderungan ini memberi bukti madrasah dan pesantren diyakini dapat menjadi benteng yang ampuh untuk menjaga kemerosotan moralitas masyarakat.

e. Lembaga Pendidikan Alternatif

Modernisasi kehidupan masyarakat akibat perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan, telah melahirkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan sistem persekolahan (umum) secara masal pada tahap awal telah melahirkan kemajuan-kemajuan yang menakjubkan, terutama dalam upaya untuk memberantas buta huruf dan meningkatkan kualitas penduduk yang berpendidikan sehingga dapat mencari penghidupan yang layak.

Peningkatan kualitas pendidikan ini pada gilirannya telah mempercepat tumbuhnya tingkat kesejahteraan ekonomi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke atas. Namun, peningkatan kualitas kesejahteraan ekonomi ini sayangnya tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan spiritual dan mental masyarakat. Kemajuan-kemajuan yang ada telah melahirkan bentuk kehidupan yang timpang. Di satu sisi mereka berkelebihan secara materi, tetapi di sisi lain merasa kosong secara mental spiritual.

C. SIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama; dalam manajemen Pendidikan Islam proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (umat Islam, lembaga pendidikan, atau lainnya) baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia maupun akhirat.
2. Kedua; usaha untuk mewujudkan Pendidikan Islam yang konsisten dengan visi memerlukan langkah-langkah praktis. Lembaga pendidikan islam seperti madrasah dituntut untuk melakukan perubahan strategis dalam bidang manajemen, dalam hal ini pimpinan madrasah dituntut memiliki tanggung jawab, wawasan, visi, dan keterampilan manajerial yang tangguh.
3. Tiga; manajemen islami sangat memperhatikan keterbukaan, karena berkaitan dengan nilai kejujuran, pengelolaan yang sehat dan terbuka serta transparansi, karena jabatan sebagai pimpinan adalah amanah yang harus dipelihara dengan baik dan dijalankan dengan penuh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Abudinnata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan*, 2007.

- Adiwikarta, Sudardja. *Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*, Jakarta: P2 LPTK, 1988.
- Akdon, *Manajemen Strategik untuk manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Anonymous, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta : PT Kloang Klede Putra Timur, 2003.
- Anonymous, *Master Plan Pengembangan Madrasah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan pada Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006. 2006.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 2000.
- Burahanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Daft, Ricard L, *Management* (Terj. Emil Salim, dkk), *Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2000
- Dessler, Gary, *Management*, Prentice Hall, 2002
- Djaelani, A.Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Jakarta: Dermaga, 198
- Fadjar, A. Malik, *Madrasah dan tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1999
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Ilmu Administasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.